

ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Apabila Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris diserahkan oleh ahli waris kepada Majelis Pengawas Daerah atau Notaris lain. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Notaris yang ada padanya, serta menganalisis ketentuan undang-undang mengenai prosedur dan tata cara penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif . Teknik analisis data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mencatat dari buku–buku serta peraturan undang–undang yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris berperan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kepada notaris dan penerima protokol maupun ahli waris dari notaris yang meninggal dunia. Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk menerima dan menyimpan protokol notaris. Protokol notaris yang tidak diserahkan ke notaris lain bisa berakibat pada kerugian semua pihak, terutama ketika akte itu bermasalah dan diperlukan pembuktian di pengadilan oleh semua pihak, maka kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk meminta protokol notaris kepada ahli waris dari notaris yang meninggal.

Kata kunci : Protokol Notaris, Peran Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pejabat Sementara Notaris.

ABSTRACT

Notary Protocol is a state archive document that must be kept and maintained by a Notary Public. If a Notary passes away then the notary protocol is handed over by his/her heir to the Regional Supervisory Assembly (MPD) or another Notary Public. This thesis aims to understand and analyze the Role and Responsibility of the Regional Supervisory Assembly to the notary protocol that has not been handed over to the Notary protocol holder. It also seeks to understand and analyze the provisions of the law concerning the procedure of handing over the notary protocol to notary public protocol holder. To achieve the objective of this legal research, the researcher employs a normative juridical approach method, and the data used is taken from secondary data. The data used in this study are analyzed by studying the related literature, which includes reading, understanding, and taking notes from books and relevant laws and regulations related to the subject matter studied in this research. The results of this study indicate that the Supervisory Board of Notary plays a role of guidance and supervision to the Notary in the form of guidance and supervision to the notary and received protocol and heir from the notary who passed away. Notary protocol is a collection of documents which are state archives that should be kept and maintained by a notary. Notary protocols may switch when a notary dies. MPD designates another notary as the notary receiver of the protocol to receive and store the notary protocol. Notary protocol which are not submitted to other notaries result in harm to the parties. Especially if there are problems and need to be verified in court by the regional supervisory board (MPD) is to request a notary protocol to the heirs of a notary who has died.

Keywords: Notary Protocol, the Role of the Regional Supervisory Assembly, Notary Provisional Official